

ABSTRAK

Kota Tasikmalaya menyikapi kewenangan atas hak Otonomi Daerah yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie pasca orde baru dengan membuat Perda bernuansa Syariat Islam. Penerapan Perda Syariat tersebut mengatur tentang pelaksanaan norma-norma dalam Kehidupan masyarakat. Meski demikian, pada awalnya Perda Syariat tersebut berhasil disahkan sebagai Perda No 12 Tahun 2009, akan tetapi tidak lama kemudian Perda tersebut dinilai terlalu diskriminatif dan berfokus kepada satu Agama. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya Kemendagri mencopot izin Perda tersebut dan direvisi dengan Perda No 7 Tahun 2014. Banyak aspek psikososial yang terjadi di dalam proses perumusan revisi Perda tersebut yang menarik untuk dianalisis. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Psikososial dalam Perumusan Kebijakan (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014)”. Fokus penelitian ini hanya dalam tahap Perumusan Kebijakan yang ditinjau dari aspek sosikultural. Dengan permasalahan penelitian tersebut, penulis menggunakan Teori Psikologi Sosial Secord dan Backman serta teori Perumusan Kebijakan dari Thomas R Dye. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan kualitatif deskriptif melalui pendekatan penelitian berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang mencakup pengumpulan data, tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem budaya berbasis nilai religius Islam masih mendominasi dalam perumusan kebijakan, interaksi yang terjadi menunjukkan pola hirarkis-konsultatif, dan stabilitas kebijakan yang tinggi diciptakan oleh konsensus nilai fundamental.

Kata Kunci: Perumusan Kebijakan, Psikososial, Perda Syariat

ABSTRACT

The City of Tasikmalaya responded to the authority over the right to Regional Autonomy issued by B.J. Habibe after the new order by making a Regional Regulation with Islamic sharia nuances. The implementation of the Sharia Regulation regulates the implementation of norms in the life of the community. However, at first the sharia regulation was successfully passed as Regional Regulation No. 12 of 2009, but not long after the sharia regulation was considered too discriminatory and focused on one religion. Over time, in the end the Ministry of Home Affairs revoked the Perda permit and revised it with Regional Regulation No. 7 of 2014. There are many sociocultural aspects that occur in the process of formulating the revision of the Regional Regulation that are interesting to analyze. Departing from these problems, the researcher conducted a study entitled "Sociocultural Analysis in Policy Formulation (Case Study of Regional Regulation Number 7 of 2014)". The focus of this research is only up to the Policy Formulation stage reviewed from the socio-cultural aspect. With these research problems, the researcher uses the Social Psychology Theory of Secord and Backman and the Policy Formulation theory of Thomas R Dye. The research method used is qualitative descriptive through a research approach in the form of case studies. The data collection technique uses interviews, and documentation. The data analysis technique uses qualitative analysis which includes data collection, reduction stages, data presentation, and conclusion drawn. The results of the analysis show that the cultural system based on Islamic religious values still dominates in policy formulation, the interaction that occur show a hierarchical-consultative pattern, and high policy stability is created by a consensus of fundamental values.

Keywords: Policy Formulation, Sociocultural, Sharia Regional Regulation.